



STRATEGI PENGUATAN EKSPOR UMKM UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Niken Paramita Purwanto*

Abstrak

UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, namun masih memerlukan strategi untuk memperluas akses ekspor agar mampu bersaing. Tulisan ini bertujuan untuk menggali potensi, tantangan dan strategi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan. UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar global. Namun, potensi ini masih terhambat oleh keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas produksi, kepemilikan sertifikasi internasional, serta lemahnya koordinasi kelembagaan yang menurunkan daya saing. Strategi penguatan yang perlu dilakukan mencakup regulasi ekspor yang adaptif, pendampingan berkelanjutan, dukungan pembiayaan dan asuransi perdagangan, serta sinergi antar institusi untuk memperluas akses pasar. DPR RI melalui Komisi VII perlu mendorong kebijakan ekspor UMKM yang konsisten, memperluas dukungan pembiayaan dan asuransi perdagangan, meningkatkan program pendampingan berkelanjutan, serta memperkuat diplomasi perdagangan sehingga UMKM diharapkan semakin berdaya saing, mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, serta mendukung diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (Intoniswan, 2024). Dalam menghadapi dinamika global, tantangan terbesar bagi UMKM adalah bagaimana memperluas akses UMKM ke pasar ekspor agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

Penguatan ekspor UMKM akan membuka peluang untuk memenuhi tuntutan pasar internasional yang menekankan transparansi, efisiensi, serta standar kualitas. Pemerintah Indonesia telah mendorong upaya ini melalui berbagai kebijakan, seperti fasilitasi promosi, dukungan pembiayaan, dan pendampingan usaha. Namun, keterbatasan akses permodalan, kapasitas produksi, sertifikasi produk, dan sinergi kelembagaan masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian serius.

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: niken.paramita@dpr.go.id

Capaian transaksi ekspor melalui berbagai program, termasuk *business matching*, menunjukkan bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar global. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM tidak hanya berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Penulisan ini bertujuan untuk menggali potensi, tantangan dan strategi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekspor sektor UMKM ini di masa datang.

UMKM dan Perdagangan Global

UMKM tidak hanya berperan sebagai pilar utama perekonomian nasional, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi, terutama pada masa krisis. Saat sektor formal mengalami tekanan, UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks perdagangan global, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak diplomasi ekonomi. Melalui peningkatan kapasitas ekspor, UMKM dapat berkontribusi langsung pada penguatan neraca perdagangan dan peningkatan devisa negara. Lebih jauh, keberhasilan UMKM menembus pasar internasional sekaligus mencerminkan citra positif Indonesia sebagai negara dengan daya saing produk yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan UMKM bukan hanya isu domestik, tetapi juga strategi penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Tren permintaan global terhadap produk bernilai budaya, ramah lingkungan, dan berkelanjutan membuka peluang besar bagi UMKM Indonesia yang kaya akan bahan baku lokal serta memiliki kreativitas tinggi. Keberhasilan Kementerian Perdagangan melalui Program UMKM BISA Ekspor, yang mencatat transaksi sebesar Rp1,49 triliun pada Januari–Agustus 2025, menjadi bukti bahwa UMKM Indonesia mampu menembus pasar global ketika mendapat dukungan yang tepat (Prayudhia, 2025), seperti penguatan kebijakan agar keberlanjutan ekspor dapat terjamin. Dalam hal ini, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki peran strategis untuk memastikan regulasi, dukungan pembiayaan, serta sinergi kelembagaan berjalan konsisten guna memperkuat UMKM sebagai aktor ekspor nasional.

Potensi UMKM

Kementerian Perdagangan mencatat total transaksi *business matching* antara UMKM Indonesia dengan *buyer* internasional sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai US\$90,90 juta (Rp1,49 triliun). Dari jumlah tersebut, sebesar US\$55,95 juta berasal dari *purchase order* (PO) yang sudah terikat kontrak, sedangkan US\$34,95 juta masih berupa potensi transaksi yang sedang dalam tahap negosiasi (Prayudhia, 2025). Angka ini menandai capaian penting karena menunjukkan peningkatan akses pasar global yang dapat dimanfaatkan UMKM secara lebih berkelanjutan.

Selama periode tersebut, Kemendag telah menyelenggarakan 462 kegiatan *business matching*, yang terdiri atas 312 sesi presentasi UMKM kepada perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dan 150 pertemuan langsung dengan calon *buyer* internasional (Prasetya, 2025). Kegiatan ini tidak hanya mempertemukan UMKM dengan mitra dagang potensial, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran mengenai standar kualitas, negosiasi kontrak, dan peluang distribusi di pasar global.

Sebanyak 110 UMKM ikut serta dalam program ini, mencakup sektor unggulan seperti fesyen, kerajinan, furnitur, kopi, bambu, rempah, hingga makanan-minuman olahan. Diversifikasi sektor ini menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia memiliki potensi kompetitif di berbagai segmen pasar internasional, baik berbasis budaya maupun komoditas unggulan. Lebih jauh, dukungan lintas lembaga seperti perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, dan BUMN memperkuat keberlanjutan program (Kementerian Perdagangan RI, 2025).

Strategi dalam Penguatan Ekspor UMKM

Meskipun capaian transaksi *business matching* menunjukkan perkembangan positif, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian. *Pertama*, sebagian besar UMKM menghadapi keterbatasan akses pembiayaan ekspor, baik untuk modal kerja maupun fasilitas asuransi perdagangan. Kondisi ini mengakibatkan banyak UMKM kesulitan menjaga arus kas ketika memperoleh kontrak berskala besar (World Bank, 2023).

Kedua, keterbatasan kapasitas produksi dan minimnya kepemilikan sertifikasi internasional (misalnya *International Organization for Standardization* (ISO), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), atau organik) berpotensi mengganggu keberlanjutan kontrak ekspor. Hal ini mengurangi daya tawar UMKM dalam memenuhi permintaan *buyer* global secara konsisten (Kementerian Perdagangan RI, 2025).

Ketiga, penetrasi pasar masih terkonsentrasi pada *buyer* tertentu, sehingga menimbulkan risiko ketergantungan tinggi. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM tidak terjebak pada volatilitas permintaan dari negara tertentu (UNCTAD, 2024).

Selain itu, meski terdapat dukungan dari 15 lembaga pembina UMKM, koordinasi kelembagaan antarinstansi masih belum optimal. Tantangan regulasi terkait prosedur ekspor, standar kualitas, serta insentif fiskal juga dinilai menjadi hambatan yang memerlukan perhatian DPR RI, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan (IMF, 2024).

Penguatan ekspor UMKM perlu diarahkan pada regulasi yang lebih adaptif dan sederhana agar proses sertifikasi, penyederhanaan prosedur ekspor, serta pemberian insentif fiskal dapat lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Dengan regulasi yang tepat,

UMKM akan lebih mampu terlibat dalam rantai pasok global secara berkelanjutan (WTO, 2023). Di sisi lain, ketersediaan pembiayaan menjadi faktor kunci yang harus diperkuat. Skema kredit ekspor, penjaminan, dan asuransi perdagangan yang terjangkau dapat membantu UMKM menjaga arus kas, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengurangi risiko gagal kontrak ketika memperoleh pesanan dalam jumlah besar (OECD, 2022; World Bank, 2023).

Selain dukungan regulasi dan pembiayaan, pendampingan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing. Program pelatihan yang berfokus pada kualitas produk, desain, *branding*, dan sertifikasi internasional memungkinkan UMKM memenuhi standar global sekaligus membuka peluang kontrak jangka panjang (Kementerian Perdagangan RI, 2025). Upaya ini perlu diimbangi dengan sinergi kelembagaan antar kementerian, lembaga keuangan, dan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri. Kolaborasi lintas institusi akan memperkuat promosi terintegrasi serta memperluas akses pasar internasional secara lebih konsisten (Prayudhia, 2025).

Penutup

Capaian transaksi ekspor UMKM melalui *business matching* sebesar Rp1,49 triliun pada Januari–Agustus 2025 menunjukkan potensi besar UMKM Indonesia dalam menembus pasar global. Namun, tantangan terkait akses pembiayaan, kapasitas produksi, sertifikasi internasional, dan koordinasi kelembagaan masih menjadi kendala utama bagi keberlanjutan ekspor. Strategi penguatan yang perlu dilakukan mencakup regulasi ekspor yang adaptif, pendampingan berkelanjutan, dukungan pembiayaan dan asuransi perdagangan, serta sinergi antar institusi untuk memperluas akses pasar.

DPR RI khususnya komisi VII perlu memberikan perhatian dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memperkuat dukungan kebijakan bagi UMKM. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang mendukung ekspor UMKM, memperluas dukungan pembiayaan dan asuransi perdagangan, meningkatkan program pendampingan berkelanjutan, serta memperkuat diplomasi perdagangan. Dengan langkah tersebut, UMKM diharapkan semakin berdaya saing, mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, serta mendukung diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Referensi

- Intoniswan. (2024, Agustus 23). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 60,51 persen dan serap 96,92 persen tenaga kerja. *Niaga.Asia*. <https://www.niaga.asia/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-indonesia-6051-persen-dan-serap-9692-tenaga-kerja/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, Juli 22). Menko Airlangga: Pemerintah dukung bentuk kolaborasi baru agar UMKM Indonesia jadi bagian rantai pasok industri global [Siaran pers]. Ekon.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025, September 8). Kemendag catat transaksi business matching UMKM tembus Rp1,49 triliun Januari–Agustus 2025 [Siaran pers]. *Kemendag*. <https://www.kemendag.go.id>
- Prasetya, A. D. (2025, September 9). Transaksi UMKM dalam negeri periode Januari–Agustus 2025 tembus Rp1,49 triliun. *MerahPutih.com*. <https://www.merahputih.com/post/read/transaksi-umkm-dalam-negeri-periode-januari-agustus-2025-tembus-rp-1-49-triliun>
- Prayudhia, M. C. G. (2025, September 8). Kemendag catat transaksi business matching UMKM capai Rp1,49 triliun hingga Agustus 2025. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/5093041>
- UNCTAD. (2024). World investment report 2024: Investing in sustainable energy for all. *United Nations Conference on Trade and Development*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
- World Trade Organization. (2023). World trade report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive, and sustainable future. *WTO*. <https://www.wto.org>

